

# Laporan Keuangan Pemkab Kapuas Hulu

## BPK-RI Berikan Opini Wajar

### Viodeogo

Borneo Tribune, Putussibau

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI wilayah Kaimantan Barat memberikan "Opini Wajar" dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2010. Hasil penilaian tadi mengalami peningkatan dari penilaian BPK tahun sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir pada acara penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kapuas Hulu tahun anggaran 2010, Kamis (18/8) di aula DPRD.

"Pada tahun sebelumnya kita mendapat "Opini Disclaimer" atau tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan Pemkab pada tahun anggaran 2009. Semoga ke depan kinerja kita semakin baik sehingga mendapat-

kan opini wajar tanpa pengecualian," kata Nasir.

Sebagai ringkasan dari hasil perhitungan laporan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2010 yang telah diaudit oleh BPK-RI menyebutkan di dalam struktur APBD terdiri tiga komponen pokok yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

"Banyaknya perubahan perundangan di bidang keuangan daerah, mau tidak mau menyebabkan berbagai peraturan pemerintah yang mengatur hal sama juga berubah. Kami sebagai pengguna anggaran diharapkan harus cepat tanggap mengikuti dan menyesuaikan segala macam perubahan," terangnya.

Sampai saat ini Pemkab mengalami keterbatasan SDM di bidang akuntansi dan penata usaha keuangan di tiap SKPD. Akibatnya menyulitkan dalam

proses konsolidasi laporan keuangan Pemkab Kapuas Hulu.

Diharapkan ke depan kepala SKPD lebih cepat dalam penyampaian SPJ. Dan kepada semua kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus dapat mempertanggungjawabkan semua anggaran di SKPD masing-masing dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu paling lama 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir," harapnya.

Laporan yang dibuat tersebut berbentuk laporan realisasi anggaran, arus kas neraca dan catatan atas laporan keuangan harus berpedoman standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan Pemkab juga menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas di mana suatu informasi tersebut berguna dalam pengambil-



Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menyampaikan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kapuas Hulu tahun anggaran 2010, Kamis (18/8) di Aula DPRD Kapuas Hulu. FOTO: Viodeogo/Borneo Tribune

an keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya.

Sehingga pemerintah dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan laporan keuangan dengan membandingkan informasi anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja.